

Strategi *Capacity Building* dalam Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia

Penulis:
Rita Margaretha

Afiliasi:
Universitas Nurtanio

Korespondensi:
ritamargaretha133@gmail.com

Histori Naskah:
Submit: 12-02-2024
Accepted: 27-02-2024
Published: 01-03-2024

Abstrak: Pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala, terutama dalam pengelolaan sampah, pembangunan infrastruktur, pengelolaan air, dan pelestarian kebudayaan lokal. Oleh karena itu, diperlukan strategi *capacity building* untuk memperkuat kapasitas pemerintah dalam mengelola pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif dengan teori *Capacity Building* yang dikembangkan oleh Grindle (1999). Hasil menunjukkan bahwa strategi *capacity building* yang diusulkan mencakup pengembangan SDM, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan dalam Pengembangan SDM dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan, sertifikasi, serta pendekatan partisipatif serta Reformasi kelembagaan dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antarinstansi, memperkuat lembaga pengawas dan regulator, meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, mengoptimalkan penggunaan teknologi, dan meningkatkan literasi dan edukasi pariwisata. **Kata kunci:** *Capacity Building* ; Masyarakat; Pariwisata Berkelanjutan; Strategi

Pendahuluan

Pariwisata merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia mengadopsi konsep pariwisata berkelanjutan untuk memastikan bahwa pertumbuhan pariwisata berjalan di seiring dengan menjaga ekosistem alam, masyarakat lokal, serta kebudayaan (Nasrullah & Susanty, 2020); (Setiawan, 2016). Namun, upaya ini tidak mudah untuk diimplementasikan karena masih ada berbagai tantangan dan kendala, sehingga pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Indonesia masih perlu terus ditingkatkan. Kendala lainnya yang dihadapi dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Indonesia adalah masalah pembangunan infrastruktur pariwisata (Rahma, 2020). Padahal, pembangunan infrastruktur adalah salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan pariwisata, namun terkadang infrastruktur dan fasilitas pariwisata yang dibangun tidak memperhatikan dampak lingkungan (Kurnianingsih, Nazaki, Adhayanto, Apriani Putri, & Mahadiansar, 2022); (Oktaviana, Muhammad, Kurnianingsih, & Mahadiansar, 2021). Hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam keberlanjutan pariwisata, sehingga perlu ada kajian mengenai dampak lingkungan dan sosial sebelum membangun infrastruktur pariwisata. Terkait dengan keterbatasan infrastruktur, pengelolaan air juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang rawan kekurangan air, sehingga pengelolaan air menjadi penting dalam memastikan keberlanjutan wisata (Budhi Pamungkas Gautama, Yuliahwati, Nurhayati, Fitriyani, & Pratiwi, 2020); (Syah, 2017).

Dalam konteks ini, pemerintah perlu membangun infrastruktur pengelolaan air bersih dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengelola wisata mengenai penghematan dan penggunaan air yang ramah lingkungan. Selain masalah lingkungan, pengelolaan pariwisata berkelanjutan juga perlu memperhatikan keberlanjutan sosial dan budaya. Budaya dan kearifan lokal menjadi salah satu daya tarik wisata yang penting, namun terkadang kebudayaan lokal bisa terancam oleh nilainya yang diabaikan oleh pengelola pariwisata. Oleh karena itu, penting bagi pengelola wisata untuk melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata dan juga mempromosikan kebudayaan lokal sebagai bagian dari pengalaman

wisata yang autentik.

Menjaga integritas ekosistem dan meminimalkan dampak sosial serta budaya negatif tentu tidaklah mudah, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Indonesia memiliki manfaat jangka panjang yang besar bagi perekonomian dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu ada kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pengelola wisata agar pariwisata berkelanjutan dapat diwujudkan di Indonesia (Asthu, 2020); (Yusnita, Kurnianingsih, & Soebagiya, 2021). Selain itu, dibutuhkan juga peningkatan kesadaran dan edukasi bagi wisatawan dan masyarakat umum mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan budaya lokal dalam perjalanan wisata. Dengan komitmen bersama, pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Indonesia dapat menjadi faktor penting dalam memajukan sektor pariwisata dan perekonomian secara keseluruhan (King, Iba, & Clifton, 2021); (Fransisca & Purnomo, 2019); (Purnomo, Fathani, Setiawan, Fadhlurrohman, & Nugroho, 2021).

Tujuan dari penelitian strategi *capacity building* pemerintah pada pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Indonesia adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi apa yang perlu digunakan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola pariwisata berkelanjutan di Indonesia (Fanany, Fanany, & Kenny, 2010). Melalui strategi *capacity building*, pemerintah dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengelola pariwisata berkelanjutan, termasuk peningkatan kapasitas dalam pengelolaan lingkungan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan infrastruktur pariwisata, dan pengelolaan pemasaran pariwisata (R Rukmana & Kurniawan Purnomo, 2023).

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategi dan langkah-langkah konkrit yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola pariwisata berkelanjutan. Hal ini sangat penting karena pariwisata berkelanjutan di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi dan pengembangan masyarakat lokal yang berkelanjutan, serta melestarikan alam dan warisan budaya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan memperkaya literatur ilmiah dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi para ahli, pemerintah, dan *stakeholder* terkait lainnya dalam mengembangkan kapasitas mereka dalam mengelola pariwisata berkelanjutan di Indonesia dan negara-negara lainnya di dunia.

Studi Literatur

Hasil penelitian terdahulu dari (Damayanti, Soeaidy, & Ribawanto, 2011) menunjukkan bahwa pengembangan potensi Kampong Ekowisata Bendosari yang digagas oleh Pemerintah Desa dengan menerapkan strategi *capacity building* dari seluruh elemen yang terlibat sebagai pengelola ekowisata yaitu Pemerintah Desa, masyarakat lokal dan juga organisasi lokal. Dalam pengembangan Kampong Ekowisata Bendosari, juga dapat menghasilkan manfaat yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan perekonomian masyarakat lokal yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, membaiknya infrastruktur desa, dan meluasnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kemudian faktor pendukung pengembangan Kampong Ekowisata Bendosari adalah karakteristik potensi ekowisata, antusias masyarakat lokal dalam melaksanakan program pembangunan.

Dari penelitian (Sutiarmo, 2018) Arah, kebijakan, strategi dan program pengembangan ekowisata harus dibuat selaras dan sinergi dengan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan secara nasional, agar tidak menyimpang dari tujuan pembangunan kepariwisataan nasional yaitu: Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata; Mengkomunikasikan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab; Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional, dan Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran wisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Dalam penelitian (Sihombing & Suprihanto, 2023) Kondisi level kapasitas masyarakat Desa Wisata Bagot mencerminkan pemberdayaan yang dialami yaitu pemberdayaan sosial dan psikologis masuk dalam kategori tinggi dan pemberdayaan politi masuk dalam kategori sedang.

Potensi wisata alam, budaya, kuliner yang dimiliki Dusun Tegal Balongharus dikelola dan dipasarkan dengan baik di era digital dengan media yang tepat sehingga Dusun Tegal Balong dapat menjadi destinasi wisata pedesaan yang berkelanjutan. Pendampingan peningkatan kapasitas pengelolaan *social media marketing* di Dusun Tegal Balong, Bimomartani, Ngemplak, Sleman dilakukan dalam rangka memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman dasar berkaitan dengan *social media marketing* dan pariwisata berkelanjutan serta meningkatkan kapasitas pengelola *social media marketing* untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan Dusun Tegal Balong, Bimomartani, Ngemplak, Sleman. Pendampingan ini menghasilkan peningkatan kapasitas dan kreativitas dalam bersosial media untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui akun *social media* sebagai sarana pemasaran Dusun Tegal Balong, Bimomartani, Ngemplak, Sleman (Rubiyatno, Kurniawati, & Diva, 2021).

Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif merupakan salah satu metode penelitian yang memfokuskan pada deskripsi fenomena yang diamati atau peristiwa yang dijelaskan secara detail (Moleong, 2012) Metode ini bertujuan untuk memahami karakteristik dan konsep dari suatu fenomena sebagai bentuk pengenalan awal terhadap fenomena yang akan diteliti. Dalam penelitian kualitatif pendekatan deskriptif, peneliti tidak hanya mencari jawaban atas permasalahan, tetapi juga mencari pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mempelajari suatu fenomena dari sudut pandang yang berbeda, melihat dari berbagai aspek dan memahami kaitan antara satu aspek dengan aspek lainnya (Bungin, 2015).

Dalam metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif, peneliti memiliki peran aktif dalam pengambilan data dan analisis data. Peneliti harus secara terus-menerus melakukan refleksi pada dirinya sendiri, mengidentifikasi bias dan mempertimbangkan bagaimana sudut pandangnya mempengaruhi hasil analisis. Hasil dari penelitian kualitatif pendekatan deskriptif adalah deskripsi yang sangat detail, menyeluruh, dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang topik penelitian, yang akan membantu dalam pengembangan teori atau konsep yang lebih luas (Patton, 2014).

Teori *Capacity Building* yang digunakan yaitu menggunakan konsep Grindle (1999). buku "*Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*" memberikan pandangan yang jelas tentang upaya membangun kapasitas sektor publik di negara-negara berkembang. Adapun penjelasan pada dimensi serta fokus dalam teori *Capacity Building* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Teori *Capacity Building* membangun kapasitasnya di negara berkembang

Dimensi	Fokus	Jenis Aktivitas
Pengembangan SDM	Menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan • Praktek Kerja Langsung • Rekrutmen

Penguatan Organisasi	Melaksanakan Pengelolaan dalam rangka meningkatkan keberhasilan peran dan fungsinya	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem insentif • Sistem SDM • Kepemimpinan • Budaya Organisasi • Komunikasi
Reformasi Kelembagaan	Pengaturan Kelembagaan Secara Makro	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan yang berlaku • Pengaruh lingkungan

Hasil

Kondisi Eksisting Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia

Pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan di Indonesia untuk mendongkrak perekonomian nasional. Potensi alam dan kebudayaan Indonesia yang kaya, serta masyarakat yang ramah dan beragam menarik minat wisatawan dari berbagai negara. Pemerintah sebagai regulator sektor pariwisata harus memiliki peran penting dalam mengelola industri pariwisata secara berkelanjutan. Namun, kondisi eksisting pemerintah pada pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Indonesia masih sangat perlu ditingkatkan. Dari beberapa aspek pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Indonesia, khususnya dalam hal konservasi lingkungan dan pengembangan masyarakat lokal, masih didominasi oleh kepentingan ekonomi belaka, yang diabaikan aspek keberlanjutan. Pemerintah lebih sering mengejar target kunjungan wisata dan meningkatkan pendapatan negara dari pajak wisata, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.

Salah satu contoh konkret dari kurangnya konsistensi pemerintah dalam menjalankan pengelolaan pariwisata berkelanjutan adalah masalah pengelolaan sampah. Banyak destinasi wisata di Indonesia, terutama pantai dan pulau, mengalami masalah yang sangat serius dengan sampah plastik. Pemerintah kerap lebih fokus pada peningkatan jumlah wisatawan, tanpa memikirkan infrastruktur dan program kebersihan yang memadai untuk menangani sampah yang dihasilkan oleh kunjungan wisata. Hal ini mempengaruhi kualitas lingkungan dan daya tarik wisata di masa depan. Selain masalah lingkungan, pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang tidak memperhatikan kondisi masyarakat lokal juga menjadi isu yang penting. Banyak destinasi wisata di Indonesia yang menarik adalah hasil dari kearifan lokal dan budaya setempat. Namun, dalam pengembangan pariwisata seringkali masyarakat lokal dan kearifan budaya yang dimiliki dilepaskan dan lebih ditekankan pada bisnis dan keuntungan. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara dengan keberagaman suku, bahasa dan budaya yang sangat luar biasa. Sayangnya, terdapat perbedaan yang sangat jauh dalam pengembangan destinasi wisata di daerah-daerah tersebut. Beberapa wilayah telah mendapatkan perhatian yang cukup besar dan terlihat berkembang karena dukungan pemerintah, namun tidak sedikit daerah lain yang tidak mendapatkan perhatian apa pun dari pemerintah, tidak mendapatkan akses infrastruktur yang memadai, dan tetap dalam kemiskinan.

Peningkatan dukungan pemerintah pada pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Indonesia sangat dibutuhkan, terutama dalam hal pengembangan ekowisata serta pengembangan masyarakat lokal. Pemerintah harus memasukkan faktor keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam rencana pengembangan pariwisata di seluruh Indonesia. Hal ini harus dimulai dengan mempertimbangkan kepentingan lingkungan dan masyarakat lokal sebelum memikirkan potensi keuntungan yang didapatkan. Pengelolaan sampah, pengurangan konsumsi energi fosil, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak harus menjadi fokus utama dalam pengembangan destinasi wisata. Ada juga upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Misalnya, melakukan kampanye penyuluhan kepada masyarakat lokal untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar, atau membantu petani dan nelayan setempat dalam mengembangkan produk wisata berbasis ekowisata dan budaya setempat.

Dalam kesimpulannya, upaya pemerintah Indonesia dalam menjalankan pengelolaan pariwisata berkelanjutan masih perlu ditingkatkan. Mereka perlu memperhatikan faktor lingkungan dan sosial sebelum memikirkan faktor ekonomi semata. Kampanye penyuluhan, pengembangan ekowisata dan budaya setempat, serta pengurangan konsumsi energi fosil perlu menjadi fokus utama untuk mendorong pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di seluruh Indonesia. Jika dijalankan secara konsisten, maka pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang lebih baik dapat membawa manfaat jangka panjang bagi lingkungan, masyarakat lokal, juga bagi perekonomian nasional.

Strategi *Capacity Building* Pada Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia

Pengembangan SDM

Pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) adalah suatu proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan jumlah kemampuan serta pengetahuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Kurnianingsih & Safitri, 2017) (Thoha, 2012). Pengembangan SDM penting untuk meningkatkan kinerja organisasi dan daya saing di pasar yang semakin kompetitif. Pengembangan SDM meliputi berbagai aspek seperti pelatihan, pembelajaran, coaching, mentoring, pengalaman kerja, dan pengembangan karir. Tujuannya adalah untuk mendorong karyawan agar memiliki kemampuan dan potensi yang lebih baik, serta meningkatkan produktivitas dan inovasi di perusahaan. Pengembangan SDM juga dapat membantu karyawan dalam memperluas pengetahuan mereka, meningkatkan keterampilan, memperbaiki performa, dan membangun hubungan yang lebih baik antar karyawan dan dengan manajemen perusahaan. Hal ini kemudian dapat meningkatkan kepuasan kerja dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi pariwisata sangat besar, memiliki tantangan besar dalam mengelola industri pariwisata ini secara berkelanjutan. Salah satu cara untuk menjawab tantangan ini adalah dengan pengembangan SDM pengelola pariwisata berkelanjutan. Berikut ini adalah strategi pengembangan SDM pengelola pariwisata berkelanjutan di Indonesia: Penyusunan rencana pengembangan SDM. Di mana merumuskan rencana pengembangan SDM yang jelas dan terarah sangat penting dalam pengembangan SDM pengelola pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Rencana ini harus meliputi identifikasi kebutuhan SDM, pengembangan kurikulum, program pelatihan, dan pengembangan karir.

Pelatihan dan pendidikan. Pelatihan dan pendidikan yang berkualitas akan membantu para pengelola pariwisata dalam memahami konsep serta pentingnya pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Sertifikasi. Sertifikasi dapat menjadi alat untuk memvalidasi kualifikasi pengelola pariwisata dan memastikan bahwa mereka sudah memenuhi standar keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Sertifikasi juga dapat membantu pengelola pariwisata dalam memperkuat reputasi mereka dalam industri pariwisata.

Pendekatan partisipatif. Pengelolaan pariwisata juga harus dilakukan melalui pendekatan partisipatif. Hal ini melibatkan para pengelola pariwisata, masyarakat setempat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan pariwisata. Dengan demikian, pengambilan keputusan yang diambil lebih berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Penggunaan teknologi. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Penggunaan teknologi dapat membantu dalam memonitor dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas pariwisata, sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan yang tepat. Penyediaan sumber daya. Pengelolaan pariwisata berkelanjutan membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai. Hal ini meliputi dukungan finansial, infrastruktur dan peralatan yang memadai, serta dukungan dari masyarakat setempat. Dengan adanya dukungan ini, maka pengelolaan pariwisata berkelanjutan dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Dalam pembahasan nanti, pengembangan SDM pengelola pariwisata berkelanjutan di Indonesia

mebutuhkan rencana yang terarah dan jelas, pelatihan dan pendidikan yang berkualitas, sertifikasi, pendekatan partisipatif, penggunaan teknologi, dan penyediaan sumber daya yang memadai. Dengan menggunakan strategi ini, dapat diharapkan bahwa pengelolaan pariwisata di Indonesia akan semakin berkelanjutan dan efektif dalam menjawab tantangan yang ada.

Pembahasan

Penguatan Organisasi

Penguatan organisasi adalah proses meningkatkan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan. Penguatan organisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan efektivitas manajemen, memperbaiki sistem dan prosedur operasi, meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengembangkan sumber daya keuangan, serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk memperkuat posisi organisasi di dalam lingkup pasar atau industri, meningkatkan reputasi dan citra organisasi, serta menjaga keberlanjutan dan daya saing organisasi (Sumartik & Ambarwati, 2023).

Pemanfaatan sumber daya alam yang berlimpah membuat pariwisata menjadi salah satu sektor utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun, pengelolaan pariwisata yang kurang bijak dapat membawa dampak buruk terhadap lingkungan, budaya, dan ekonomi lokal. Oleh karena itu, strategi penguatan organisasi dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Indonesia perlu diimplementasikan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan: Membangun sinergi antar *stakeholder*. Kerja sama antar pemerintah, masyarakat, pengusaha, dan organisasi non-pemerintah yang relevan perlu dibangun. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan pariwisata dilakukan secara berkelanjutan dan memberi manfaat kepada semua pihak. Sinergi antar stakeholder juga dapat meminimalkan konflik yang mungkin terjadi di daerah pariwisata.

Mempromosikan pariwisata berkelanjutan. Diseminasi informasi yang tepat dan edukasi ke masyarakat tentang cara melakukan turisme yang berkelanjutan perlu dilakukan. Selain itu, pengembangan produk pariwisata berkelanjutan dapat dilakukan dengan memanfaatkan siaran pers, pameran, dan media sosial. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pariwisata berkelanjutan dan membawa dampak positif bagi daerah pariwisata tersebut. Mengembangkan kelembagaan pariwisata berkelanjutan. Pembentukan kelembagaan yang memfasilitasi pengembangan pariwisata berkelanjutan perlu dilakukan. Kelembagaan tersebut dapat mengembangkan program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan. Melalui program tersebut, masyarakat dan pelaku bisnis dapat memahami lebih lanjut tentang manfaat pariwisata berkelanjutan.

Mengembangkan Program Ekowisata. Ekowisata dapat menjadi solusi alternatif bagi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Ekowisata dapat menghubungkan pelestarian lingkungan dan budaya dengan pengembangan ekonomi dan sosial dalam satu program wisata. Namun, pengembangan ekowisata tidak mudah, memerlukan kerja sama yang erat antara semua pihak. Membuat perencanaan pariwisata yang berkelanjutan. Perencanaan pariwisata terkait dengan pengembangan destinasi wisata perlu mengacu kepada kriteria pariwisata berkelanjutan, termasuk pelestarian lingkungan, keberlanjutan ekonomi, dan keadilan sosial. Perencanaan pariwisata juga harus memperhitungkan dampak lingkungan, budaya, dan sosial dalam jangka panjang. Perencanaan ini juga tidak boleh fokus pada kemajuan pariwisata dalam waktu dekat dan mengakibatkan dampak negatif tertentu di masa depan. Mulai dari tahun 2010-an, beberapa daerah pariwisata Indonesia telah mencanangkan penerapan pariwisata berkelanjutan, dan memperkenalkan berbagai program unggulan.

Implementasi strategi penguatan organisasi dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Indonesia memerlukan kerja sama antara semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, pengusaha, dan organisasi non-pemerintah. Satu hal yang sangat terpenting adalah memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai pemilik nilai-nilai lingkungan, budaya dan ekonomi lokal di destinasi pariwisata yang harus

dilindungi dan dikembangkan untuk kepentingan bersama di masa kini maupun di masa mendatang.

Reformasi Kelembagaan

Reformasi kelembagaan adalah upaya melakukan perubahan atau perbaikan terhadap lembaga-lembaga negara, baik dari segi struktur, fungsi, maupun cara kerjanya. Tujuan dari reformasi kelembagaan adalah untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugasnya, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Turner, Prasajo, & Sumarwono, 2019). Reformasi kelembagaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti revisi undang-undang, pembentukan lembaga baru, restrukturisasi departemen atau badan, pemberian mandat baru kepada lembaga yang sudah ada, dan sebagainya (Dwiyanto, 2013)

Pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan yang besar bagi Indonesia jika dilakukan dengan baik dan berkelanjutan (Sharpley, 2020). Namun, pengelolaan pariwisata yang kurang baik dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat setempat. Oleh karena itu, strategi reformasi kelembagaan diperlukan dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan: Meningkatkan koordinasi antarinstansi. Koordinasi antarinstansi yang baik sangat penting dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Tidak hanya antara instansi pemerintah seperti Kementerian Pariwisata dan Badan Otoritas Pariwisata, tetapi juga melibatkan instansi swasta, LSM, dan masyarakat setempat.

Memperkuat lembaga pengawas dan regulator. Lembaga pengawas dan regulator harus diperkuat untuk mengawasi dan mengontrol praktik-praktik yang tidak berkelanjutan dalam industri pariwisata. Lembaga seperti Badan Pengawas Pariwisata, Komisi Pariwisata, atau Badan Pengelola Pariwisata harus memiliki kekuatan dan kewenangan untuk mengambil tindakan yang tegas terhadap praktik-praktik yang merusak. Meningkatkan partisipasi masyarakat lokal. Masyarakat setempat harus dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan pariwisata. Mereka dapat memberikan masukan dan saran yang berharga dalam upaya membangun pariwisata yang berkelanjutan. Selain itu, partisipasi masyarakat dapat memastikan bahwa manfaat ekonomi dari industri pariwisata dialokasikan secara adil dan merata. Mengoptimalkan penggunaan teknologi. Teknologi dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Penggunaan teknologi seperti sensor, drone, atau analisis data dapat membantu memonitor kelestarian lingkungan serta potensi kerusakan yang mungkin terjadi akibat aktivitas pariwisata

Meningkatkan literasi dan edukasi pariwisata. Meningkatkan literasi dan edukasi pariwisata bagi masyarakat setempat serta pengunjung sangat penting dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Masyarakat setempat perlu memiliki pengetahuan tentang potensi kerusakan lingkungan dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari kerusakan tersebut. Sedangkan pengunjung perlu diberikan informasi tentang budaya lokal serta upaya-upaya untuk mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala, terutama dalam pengelolaan sampah, pembangunan infrastruktur, pengelolaan air, dan pelestarian kebudayaan lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pengelola wisata untuk memastikan pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang lebih baik di Indonesia. Upaya pemerintah dalam menjalankan pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Indonesia perlu meningkatkan perhatian terhadap faktor lingkungan, sosial, dan budaya sebelum fokus pada keuntungan ekonomi.

Strategi *capacity building* pada pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Indonesia perlu berfokus pada pengembangan SDM, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan. Pengembangan SDM dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan, sertifikasi, serta pendekatan partisipatif. Penguatan organisasi dilakukan melalui kerja sama antar *stakeholder*, promosi pariwisata berkelanjutan, pengembangan

kelembagaan pariwisata berkelanjutan, pengembangan program ekowisata, dan perencanaan pariwisata yang berkelanjutan. Reformasi kelembagaan dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antarinstansi, memperkuat lembaga pengawas dan regulator, meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, mengoptimalkan penggunaan teknologi, dan meningkatkan literasi dan edukasi pariwisata.

Dalam kesimpulan ini, dapat dinyatakan bahwa pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Indonesia memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pengelola wisata. Penting bagi pemerintah untuk meningkatkan perhatian terhadap faktor lingkungan, sosial, dan budaya sebelum fokus pada keuntungan ekonomi. Strategi *capacity building* pada pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Indonesia perlu berfokus pada pengembangan SDM, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan untuk memastikan pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang lebih baik di masa depan.

Referensi

- Asthu, A. A. (2020). Pengembangan Wilayah Perbatasan Indonesia Menggunakan Pendekatan Pariwisata. *Jurnal Sositologi, 19*(1), 75–90, 19(1), 75–91.
- Budhi Pamungkas Gautama, Yuliawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020). Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1*(4), 355–369. <https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.414>
- Bungin. (2015). *Analisis data penelitian kualitatif*. Depok: Rajawali Pers.
- Damayanti, E., Soeaidy, M. ., & Ribawanto, H. (2011). Strategy Capacity Building Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Kampong Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal (Studi di Kampong Ekowisata, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP), 2*(3), 24.
- Dwiyanto, A. (2013). *Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fanany, I., Fanany, R., & Kenny, S. (2010). Capacity Building in Indonesia: Building What Capacity? *Challenging Capacity Building, 156–184*. https://doi.org/10.1057/9780230298057_8
- Fransisca, Y., & Purnomo, A. K. (2019). Wisata Halal Lombok: Upaya Meningkatkan Minat Kunjungan Generasi Muslim Milenial. *Jurnal Manners, II*(1), 15–23.
- King, C., Iba, W., & Clifton, J. (2021). Reimagining resilience: COVID-19 and marine tourism in Indonesia. *Current Issues in Tourism, 24*(19), 2784–2800. <https://doi.org/10.1080/13683500.2021.1873920>
- Kurnianingsih, F., Nazaki, N., Adhayanto, O., Apriani Putri, R., & Mahadiansar, M. (2022). Community-Based Tourism Development Strategy in Bintan Regency, Indonesia. *Journal of Public Policy and Administration, 6*(2), 70. <https://doi.org/10.11648/j.jpaa.20220602.12>
- Kurnianingsih, & Safitri, D. P. (2017). *Manajemen Sumber daya manusia*. UMRAH Press.
- Moleong, L. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah, & Susanty, S. (2020). *Pemasaran Pariwisata: Konsep, Perencanaan & Implementas*. Penerbit Yayasan Kita Menulis.
- Oktaviana, R. F., Muhammad, A. S., Kurnianingsih, F., & Mahadiansar, M. (2021). Internal Condition Analysis on Tourism Development of Bintan Regency 2019. *Indonesian Journal of Tourism and Leisure, 2*(1), 51–61. <https://doi.org/10.36256/ijtl.v2i1.129>

- Patton, M. . (2014). *Qualitative research & evaluation methods*. Sage Publications.
- Purnomo, E. P., Fathani, A. T., Setiawan, D., Fadhlurrohman, M. I., & Nugroho, D. H. (2021). Penta-Helix Model in Sustaining Indonesia's Tourism Industry. In *Advances in Intelligent Systems and Computing* (Vol. 1352). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-71782-7_42
- R Rukmana, A., & Kurniawan Purnomo, A. (2023). Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal sebagai Lapangan Baru untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Kendan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung. *Remik*, 7(2), 907–914. <https://doi.org/10.33395/remik.v7i2.12251>
- Rahma, A. A. (2020). Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata Di Indonesia. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jnp.52178>
- Rubiyatno, R., Kurniawati, L., & Diva, M. A. (2021). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Social Media Marketing dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Dusun Tegal Balong, Bimomartani, Sleman. *Jurnal LeECOM (Leverage, Engagement, Empowerment of Community)*, 3(2), 31–38. <https://doi.org/10.37715/leecom.v3i2.2354>
- Setiawan, I. R. (2016). Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan*, 1(1), 24. Retrieved from <https://journal.stieken.ac.id/index.php/penataran/article/view/301>
- Sharpley, R. (2020). Tourism, sustainable development and the theoretical divide: 20 years on. *Journal of Sustainable Tourism*, 28(11), 1932–1946. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1779732>
- Sihombing, B., & Suprihanto, J. (2023). Analisis Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wisata Bagot, Samosir. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 10(2), 255. <https://doi.org/10.24843/jdepar.2022.v10.i02.p12>
- Sumartik, S., & Ambarwati, R. (2023). Manajemen Talenta dan Implementasinya di Industri. In *Manajemen Talenta dan Implementasinya di Industri*. <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-074-8>
- Sutiarso, M. A. (2018). Pengembangan Pariwisata yang Berkelanjutan Melalui Ekowisata. *OSFPreprint*, (September), 1–11.
- Syah, F. (2017). Strategi Mengembangkan Desa Wisata. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank Ke-3*, 3(3), 335–341.
- Toha. (2012). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Turner, M., Prasojo, E., & Sumarwono, R. (2019). The challenge of reforming big bureaucracy in Indonesia. *Policy Studies*, 43(2), 333–351. <https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1708301>
- Yusnita, Y., Kurnianingsih, F., & Soebagiya, D. U. (2021). Tourism Sector Bureaucratic Reform Strategy in Indonesia during the COVID-19 Pandemic ; Cases of Bintan. *Policy and Social ...*, 1(1), 14–20. Retrieved from <https://journal.inspire-kepri.org/index.php/PSR/article/view/31>